

Pengungkapan Kinerja Ekonomi Instansi Pemerintah Daerah Dalam
Laporan Keberlanjutan Berbasis Global Reporting Initiative
(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bandung)

Muhamad Musa Shariati¹, Syaiful Rahman Soenaria²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
Email : Muhamad20005@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak ekonomi dari aktivitas operasional Pemkot Bandung, mensimulasikan laporan keberlanjutan, dan implementasi Standar GRI. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan dengan fokus pada Pemkot Bandung. Hasilnya adalah draft laporan keberlanjutan yang mengungkap indikator ekonomi berdasarkan Standar GRI. Meskipun demikian, kesimpulan yang diambil masih terbatas karena minimnya data dan wawancara.

Kata Kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Laporan Keberlanjutan, Standar GRI, Pemerintah Kota Bandung

ABSTRACT

This research focuses on the critical role of local governments in supporting sustainable development in Indonesia, with an emphasis on the need for sustainability reporting, which is currently lacking among local governments. The study aims to assess the economic impact of Bandung City's operations, simulate a sustainability report, and apply the GRI Standards. Conducted as a single-case study using Action Research, the findings include a draft sustainability report for Bandung City, highlighting economic indicators based on GRI standards. However, conclusions are limited due to minimal data and interviews.

Keywords : Sustainable Development, Sustainability Report, GRI Standards, Bandung City Government

Article History

Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Musytari



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](#)

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, negara-negara di dunia menetapkan SDGs sebagai tujuan global yang harus dicapai pada 2030. Di Indonesia, BAPPENAS memimpin upaya pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikannya dalam RPJMN dan RPJMD. Pemerintah daerah, termasuk kota, memiliki peran penting dalam pembangunan berkelanjutan, dengan tanggung jawab yang berdampak langsung pada masyarakat. Pada tahun 2022, Kota Bandung meraih skor tertinggi di

antara 100 *Smart City* di Indonesia, dengan konsep kota pintar yang berfokus pada efisiensi, teknologi maju, dukungan lingkungan, dan inklusivitas sosial.

Implementasi program di Kota Bandung telah menghasilkan pencapaian signifikan, termasuk meraih skor tertinggi dalam indeks literasi ekonomi digital di antara 514 kota dan kabupaten di Indonesia pada tahun 2022. Prestasi ini mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dalam RPJMD. Namun, dengan populasi yang terus bertambah, diperkirakan mencapai 4 juta jiwa pada tahun 2030, Kota Bandung menghadapi tantangan besar dalam mengelola beban tersebut, yang bisa berdampak pada kualitas kehidupan warganya.

Pencapaian Kota Bandung, ditambah dengan pertumbuhan populasi yang pesat, mendorong perlunya penyusunan laporan keberlanjutan. Laporan ini akan merinci dampak dan langkah yang diambil oleh pemerintah serta menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada warga. Meskipun belum ada standar resmi dari pemerintah, Kota Bandung dapat menggunakan standar GRI (*Global Reporting Index*) yang diakui secara global. Dengan standar ini, laporan keberlanjutan akan memiliki kualitas informasi yang baik dan dapat mengungkapkan dampak signifikan secara publik, baik positif maupun negatif, serta cara pengelolaannya.

Penelitian ini berfokus kepada pengungkapan aspek ekonomi sesuai dengan Standar GRI. Aspek ekonomi ini mengungkapkan informasi tentang cara organisasi mengelola dampak kegiatan dan aktivitas di aspek ekonomi yang berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan. Aspek ini penting, karena salah satu faktor kestabilan masyarakat. Dengan mengungkapkan kinerja ekonominya secara transparan, pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi pada pemerintah Kota Bandung yang mungkin akan berdampak buruk pada kinerja pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki niat untuk mendalami penelitian lebih lanjut dalam tugas akhirnya yang berjudul "Pengungkapan Kinerja Ekonomi Instansi Pemerintah Daerah Dalam Laporan Keberlanjutan Berbasis *Global Reporting Initiative* (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)"

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Hubungan timbal balik antara organisasi dan *stakeholder* sangat penting; hubungan yang kuat meningkatkan kinerja bisnis, sedangkan hubungan yang buruk dapat menghambat kesuksesan. Hubungan ini dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghormati, dan kerja sama, dengan teori *stakeholder* sebagai kerangka kerja untuk memperkuat relasi dan mengembangkan keunggulan bisnis.

Teori Legitimasi

Teori legitimasi berkaitan dengan teori *stakeholder* dan menekankan bahwa organisasi harus memastikan aktivitasnya diterima oleh masyarakat (dilegitimasi). Teori ini didasarkan pada konsep perjanjian sosial antara organisasi dan masyarakat, di mana eksistensi perusahaan bergantung pada kemampuannya memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Perusahaan harus memperhatikan hak-hak masyarakat, tidak hanya investor. Untuk mempertahankan legitimasi, organisasi perlu menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, salah satunya melalui laporan kinerja. Laporan keberlanjutan menjadi alat untuk membangun dan mempertahankan legitimasi dengan mengkomunikasikan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan merespons kebutuhan *stakeholder*.

Teori Manajemen Sektor Publik

Teori manajemen sektor publik adalah pengembangan dari ilmu administrasi dan manajemen yang diterapkan di organisasi sektor publik, berfokus pada pengelolaan internal untuk mencapai tujuan organisasi. Berbeda dari sektor non-publik, manajemen sektor publik harus mempertimbangkan aspek eksternal seperti kebijakan publik dan pertimbangan politik. Teori ini menjelaskan prinsip dan praktik manajemen dalam organisasi publik, terutama lembaga pemerintah, yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Meskipun prinsip dasar manajemen publik diadopsi dari sektor swasta, pelaksanaan tujuannya berbeda karena karakteristik unik sektor publik.

Pembangunan Keberlanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang bertujuan meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial sambil menjaga kelestarian lingkungan. Tujuannya adalah untuk memenuhi keadilan antar-generasi dan intra-generasi. Konsep ini mendapatkan perhatian besar pada tahun 1987 melalui laporan Brundtland dan Agenda 21 pada tahun 1992, yang menekankan pentingnya pertimbangan lingkungan dalam pembangunan. Kesadaran global terhadap pembangunan berkelanjutan meningkat karena dampak negatif dari eksploitasi lingkungan terhadap stabilitas sosial.

Laporan Keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan adalah proses di mana organisasi mengukur, mengungkapkan, dan menunjukkan komitmennya untuk menjaga akuntabilitas terhadap *stakeholder* demi mencapai keberlanjutan. Konsep ini berakar dari prinsip Triple-Bottom Line yang dipopulerkan oleh Jon Elkington, yang menekankan pentingnya tidak hanya fokus pada laba tetapi juga pada aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Organisasi sektor publik, dibandingkan dengan sektor swasta, diharapkan untuk memberikan laporan keberlanjutan yang lebih komprehensif karena mereka diligitimasi oleh kontrak publik dan memiliki ekspektasi akuntabilitas yang lebih tinggi.

Standar GRI

Standar GRI adalah kerangka kerja untuk melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi organisasi. Tujuannya adalah meningkatkan nilai dan komparabilitas laporan keberlanjutan, dengan Standar GRI diakui dan digunakan oleh lebih dari 10.000 organisasi di seluruh dunia. Standar ini menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk identifikasi, pemahaman kebutuhan, dan komunikasi terbuka. GRI membantu organisasi memberikan informasi yang transparan dan terstruktur tentang kegiatan, kebijakan,

dan kinerja mereka dalam pembangunan keberlanjutan, serta memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan.

METODE PENELITIAN

Studi ini berfokus pada Pemerintah Kota Bandung sebagai studi kasus. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode penelitian tindakan atau action research. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Kinerja Instansi (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang digunakan untuk triangulasi sumber data penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pada penelitian ini merupakan aspek dan indikator GRI yang diterapkan pada pelaporan keberlanjutan Pemkot Bandung dan pengungkapannya.

Interpretasi Standar GRI

a. Standar Pengungkapan Umum

GRI 2-1: Rincian Organisasi

Pemerintah Kota Bandung diatur oleh berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bandung. Kantor pusat dan lokasi operasional terletak di Jln Wastukencana No. 2 Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

GRI 2-2 Entitas yang dimasukkan dalam pelaporan keberlanjutan organisasi

Pemerintah Kota Bandung melayani berbagai pihak terkait *stakeholder*, termasuk struktur pemerintah, masyarakat, media, akademisi, organisasi masyarakat, swasta, dan *stakeholder* lainnya.

GRI 2-3: Periode, frekuensi, dan titik pelaporan

Simulasi Laporan keberlanjutan Pemerintah Kota Bandung dilakukan pada tahun 2022.

GRI 2-5: Penjaminan Eksternal

Pemerintah Kota Bandung telah memasukkan konsep keberlanjutan dalam kegiatan operasionalnya, terbukti dari berbagai penghargaan yang diperoleh terkait dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

GRI 2-6: Aktivitas, rantai nilai, dan hubungan bisnis lainnya

Aktivitas di Kota Bandung pada tahun 2022 dilaksanakan dengan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Swasta dalam Pembangunan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak lain, pembiayaan infrastruktur non anggaran pemerintah, dan lain-lain)

GRI 2-7: Tenaga kerja

Struktur jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mencerminkan keragaman kompetensi dan tingkat pendidikan dari tenaga kerja yang terlibat.

GRI 2-8: Pekerja yang bukan pekerja langsung

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung melibatkan pekerja non-karyawan seperti kontraktor, vendor, pihak swasta, BUMD, dan pekerja sukarela.

GRI 2-9: Struktur dan komposisi tata kelola

Struktur tata kelola dapat ditemukan di situs web ppid.bandung.go.id.

GRI 2-10: Pencalonan dan pemilihan badan tata kelola tertinggi

Pemilihan Wali Kota Bandung dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

GRI 2-11: Ketua badan tata kelola tertinggi

Wali Kota Bandung memimpin koordinasi dan pengawasan kegiatan pemerintahan kota.

GRI 2-12: Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengawasi manajemen dampak

Pembagian topik ekonomi, sosial, dan lingkungan diawasi oleh berbagai badan daerah dan dinas daerah.

GRI 2-13: Delegasi tanggung jawab untuk mengelola dampak

Setiap pemegang tanggung jawab di Pemerintah memperhatikan asas efisiensi, efektivitas, fleksibilitas dan lain-lain.

GRI 2-14: Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

GRI 2-15: Konflik kepentingan

Pemerintah Kota Bandung mengoperasikan sistem pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur.

GRI 2-16: Komunikasi masalah penting

Walikota memimpin komite tata kelola dan rapat digelar setiap triwulan untuk membahas kinerja dan keuangan.

GRI 2-17: Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi

Pemerintah Kota Bandung telah menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan sejak tahun 2013 dengan memasukkan keberlanjutan dalam 10 tujuan umum RPJMD 2013-2018 dan dalam kegiatan prioritas sektoral di Jawa Barat. Ini menunjukkan keterkaitan yang kuat antara walikota sebagai badan tata kelola tertinggi dan jajaran rektor serta operasional pengetahuan yang cukup tentang keberlanjutan.

GRI 2-18: Evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi

Kinerja walikota dinilai setiap tiga bulan melalui rapat dan pemantauan. Evaluasi juga dilakukan melalui pencapaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah, dan nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

GRI 2-19: Kebijakan remunerasi

Skema remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Rumah Sakit Daerah Kota Bandung merupakan implementasi dari Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2023.

GRI 2-20: Proses untuk menentukan remunerasi

Proses penentuan remunerasi berdasarkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan hasil kinerja.

GRI 2-21: Rasio kompensasi total tahunan

Kebijakan remunerasi terdapat di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Rumah Sakit Daerah Kota Bandung dengan evaluasi tahunan oleh pemimpin BLUD.

GRI 2-22: Pernyataan tentang strategi berkelanjutan

Prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) diadopsi dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

GRI 2-23: Komitmen kebijakan

Pemerintah Kota Bandung memiliki arah kebijakan untuk menciptakan nilai jangka panjang melalui pengembangan praktik keberlanjutan di seluruh pembangunan daerah.

GRI 2-24: Menanamkan komitmen kebijakan

Mekanisme untuk mengalokasikan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dan permendagri Nomor 7 Tahun 2018.

GRI 2-25: Proses untuk memperbaiki dampak negatif

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen memastikan kegiatan operasionalnya memenuhi aspek K3, perlindungan terhadap lingkungan, pelayanan terhadap masyarakat, serta keselamatan proses dan asset integrity.

GRI 2-26: Mekanisme untuk mencari nasihat dan mengemukakan masalah

Setelah membaca Laporan Keberlanjutan Pemerintah Kota Bandung, kami memohon untuk kesediaan para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan umpan balik dengan mengirim email yang tersedia pada website resmi Pemerintah Kota Bandung.

GRI 2-27: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan

Dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung dalam Buku Bandung Dalam Angka Tahun 2022, angka kriminalitas di Kota Bandung dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

GRI 2-28: Asosiasi keanggotaan

Pemerintah Kota Bandung menjadi anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

GRI 2-29: Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan

Penilaian dalam memetakan pemangku kepentingan yaitu yang terlibat adalah Walikota, DPRD, Pemerintah Kota, Investor, masyarakat, pengusaha, LSM.

GRI 2-30: Perjanjian perundingan kolektif

Hingga akhir tahun 2022, seluruh karyawan tercakup dalam Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

b. Standar Pengungkapan Spesifik: Aspek Ekonomi

GRI 201 – Nilai Ekonomi

201-1 Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan

Menurut standar GRI, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dalam hal ini dinyatakan sebagai pendapatan sementara nilai ekonomi langsung yang didistribusikan diartikan sebagai beban operasional. Sedangkan nilai ekonomi yang disimpan adalah nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dikurangi dengan nilai ekonomi yang didistribusikan. Namun, sebagai sebuah pemerintahan yang merupakan organisasi nirlaba, Pemerintah Kota Bandung memiliki struktur keuangan yang berbeda dengan pendapatan dan beban. Meskipun berstatus nirlaba, Pemerintah Kota Bandung tidak seharusnya mengalami defisit, dan jika ada kelebihan dana, kelebihan tersebut akan dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan operasional Kota Bandung dan tidak digunakan untuk menguntungkan pihak tertentu.

Kota Bandung mencatat informasi tentang pendapatan dan beban dalam laporan operasional. Laporan operasional Kota Bandung yang memuat mengenai pendapatan serta beban yang dimiliki Kota Bandung selama tahun 2022 dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2022 yang bisa diakses melalui www.bandung.go.id

201-2 Implikasi Finansial Serta Risiko Dan Peluang Lain Akibat Dari Perubahan Iklim

Dampak perubahan Iklim (DPI) di tahun 2022 terjadi kekeringan seluas 1 Ha menyerang padi pada umur 60 Hst (Hari setelah tanam) pada Kecamatan Cibiru dan Kebanjiran Seluas 9 Ha menyerang Padi pada umur 30 dan 90 Hst (Hari setelah Tanam) pada kecamatan Bandung Kidul, buah batu, dan Gedebage. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim tersebut dapat diatasi dengan cara Pompanisasi dan Bantuan Benih tanaman sehingga dapat menyelamatkan hasil produksi tanaman tersebut. Faktor pendukung untuk menangani masalah ini adalah dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana Masih tingginya kasus DBD di Kota Bandung menunjukkan perlunya penanganan yang terus menerus dan berkelanjutan. Kenaikan jumlah kasus disebabkan perubahan iklim dimana membuat tempat jentik nyamuk berkembang menjadi lebih banyak dan membuat jumlah kasus DBD naik secara nyata. Kasus DBD pada tahun 2022 relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya diduga pula terjadi karena aktivitas masyarakat sudah mulai normal, sehingga penularan menjadi lebih

tinggi. Pada tahun 2022, terdapat 2 kasus kekeringan pada pertanian. 2 kasus tersebut sudah ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan kerugian berarti bagi petani

201-3 Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya

Dana pensiun diberikan kepada karyawan Pemkot Bandung sesuai dengan PP No. 18 tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri (PNS) dan Janda/Duda. Karyawan Pemkot Bandung yang merupakan PNS akan dikenai potongan 8% per bulan dari gajinya. 4,75% untuk program jaminan pensiun 3,25% untuk program JHT. Iuran 4,75% diakumulasikan sebagai iuran pensiun dan bukan dana pensiun. Sementara iuran 3,25% dikelola PT Taspen dan akan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun. PNS baru menerima uang pensiunan saat memasuki batas usia pensiun yakni 56 tahun. Penghasilan PNS pada saat aktif dan pada saat pensiun sangat jauh berbeda. Saat aktif, PNS tidak hanya menerima gaji pokok saja, take home pay PNS pada saat masih aktif terdiri dari gaji pokok dan berbagai jenis tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan sebagainya.

201-4 Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah

Kota Bandung mendapatkan bantuan secara finansial dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur kebijakan tentang Transfer ke Daerah. Terdapat 3 jenis transfer ke daerah, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), bersumber dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
3. Dana Alokasi Khusus (DAK), bersumber dari pendapatan APBN, dialokasikan untuk untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

GRI 202: Keberadaan Pasar

202-1 Rasio standar upah karyawan pemula berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional

Dalam menentukan besaran gaji pokok serta berbagai tunjangan lainnya yang diterima karyawan pemula Kota Bandung mengacu kepada peraturan yang berlaku dan meninjau hasil penilaian kinerja karyawan serta mempertimbangkan level jabatannya, Pemkot Bandung tidak membedakan besaran gaji berdasarkan jenis kelamin dan rasio gaji pokok dan renumerasi berdasarkan jenis kelamin adalah 1:1. Rasio gaji terhadap upah minimum regional yang berlaku juga adalah 1:1.

202-2 Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat setempat

N/A

GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

203-1 Investasi infrastruktur dan dukungan layanan dan Pengungkapan 203-2 Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan

Sebagai organisasi pemerintahan dengan tujuan utamanya adalah melakukan pelayanan publik dan mensejahterakan masyarakat, tentu saja banyak program kerja yang dilaksanakan Pemkot Bandung bertujuan untuk berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat.

1. Upaya penurunan angka kematian ibu dilakukan melalui Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Pengelolaan Pelayanan. Angka kematian ibu pada tahun 2021 terjadi sebanyak 41 kasus, sementara pada tahun 2022 terjadi sebanyak 27 kasus. Faktor yang mendorong pencapaian ini adalah:
 - c. Menyediakan mesin Ultra Sonography (USG) di Puskesmas sebagai alat bantu diagnosis.
 - d. Pemerintah Kota Bandung menitikberatkan perhatiannya pada peningkatan fasilitas rumah sakit sebagai tempat rujukan dalam kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi.
 - e. Pemerintah Kota Bandung terus meningkatkan kualifikasi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
 - f. Upaya perbaikan pelaporan dan pencatatan layanan kesehatan ibu dan anak secara berkala, untuk melakukan analisis penyebab kematian dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan layanan kesehatan secara berkelanjutan.
 - g. Pemerintah Kota Bandung melakukan perbaikan lingkungan, baik fisik, sosial, maupun biologis, dengan cara meningkatkan akses sanitasi.
 - h. Upaya promosi kesehatan ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Meningkatnya cakupan rumah sehat dan akses penduduk terhadap air bersih, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, jumlah rumah sehat meningkat, semula terdapat sebanyak 344.402 di tahun 2021 menjadi 360.775 rumah sehat di tahun 2022.
3. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknisi SDM Optimalisasi pelayanan online dan juga pelayanan jemput bola berupa pelayanan mobil keliling (mepeling), pelayanan jemput bola bagi difabel dan lansia (bi eha dan mang udin) serta gerai-gerai pelayanan publik di mall pasca pandemi.
4. Optimalisasi pelayanan penanaman modal dan perizinan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan secara online dan pelayanan jemput bola, seperti layanan SAKEDAP (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan) untuk UMKM.
5. Pemetaan Rencana Aksi Daerah sebagai Blueprint Smart City meliputi analisis kebutuhan, analisis kelayakan, detail anggaran, analisis risiko dan survei uji publik pengembangan dan implementasi Bandung Smart City
6. Peningkatan dan Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan tercapainya realisasi persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi sebesar 22,12% dari target sebesar 14,01%
7. Program Anjungan Terima Mandiri untuk menyalurkan beras kepada masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2022, sebanyak 3.149 KK dari jumlah penduduk miskin 137.600 KK pangannya tercukupi.

8. Perbaikan rumah tidak layak huni, Pada tahun 2022 terlaksana perbaikan sebanyak 1.461 unit, untuk penanganan rutilahu di kawasan kumuh sebanyak 795 unit pada 47 Kelurahan
9. Pemberian Bantuan Sosial kepada masyarakat miskin berhasil direalisasikan sebesar 96,81%, melampaui target sebesar 76,82%, yang diperoleh dari penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai.
10. Pelayanan pendidikan bagi masyarakat miskin, yaitu pemberian beasiswa kepada 8.076 siswa SD dan 11.662 siswa SMP, dengan total realisasi dana sebesar Rp67.183.785.000.
11. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dan peternakan, Pada tahun 2022 pelaku usaha binaan di Kota Bandung berjumlah 3.560 orang dan yang aktif sebanyak 3.250 orang, atau persentase pelaku usaha binaan yang aktif mencapai 90,86 %
12. Pemerintah Kota Bandung berhasil Meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan indikator Ruang Kreatif Aktif yang terealisasi sebesar 90,32 dari target 80,65 (capaian kinerja 111,99%) yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 1. Peningkatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan realisasi sebesar 90,32%
 2. Ruang Kreatif Aktif dari target sebesar 80,65% atau mencapai 111,99%.
 3. Minat masyarakat terutama pelaku ekonomi kreatif pemula tinggi terhadap program aktivasi ruang kreatif (co-working space). Selain itu, modul pengembangan pelaku ekraf pemula yang disusun sebelum pelatihan dan pendampingan membantu pelaksanaan aktivasi di lapangan.
 4. Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan realisasi persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi sebesar 22,12% dari target sebesar 14,01%.

GRI 204: Praktik Pengadaan

204-1 Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal

N/A

GRI 205: Antikorupsi

205-1 Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi

1. Prosedur Pengajuan Izin Usaha/Pembangunan
Pelayanan perizinan merupakan wilayah yang rentan terjadinya kasus korupsi di Indonesia, hal ini disebabkan karena proses perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Sehingga membuka celah bagi oknum birokrat untuk memanfaatkan kondisi dengan menawarkan tindakan ilegal kepada masyarakat yang menginginkan pelayanan yang cepat untuk keuntungannya sendiri (Hanida et al, 2021).
2. Penyalahgunaan Anggaran
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, Tindak pidana korupsi yang paling banyak terjadi pada tahun 2021 dan 2022 adalah penyalahgunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak celah bagi oknum untuk melakukan korupsi dalam pelaksanaan anggaran.

3. Pengadaan Barang atau Jasa

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi perkara pengadaan barang/jasa di Indonesia terjadi sebanyak 30 kali pada tahun 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa operasi ini memiliki risiko korupsi yang tinggi. Nurhajanti (2017) menyebutkan hal ini disebabkan rendahnya integritas, kualitas panitia pengadaan dan pengawasan internal untuk prosedur pengadaan, sementara itu keterlibatan pihak ketiga atau vendor dalam pengadaan juga meningkatkan potensi benturan kepentingan.

205-2 Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur antikorupsi

Pada tanggal 18 Oktober 2022, Inspektorat Daerah Kota Bandung melaksanakan Sosialisasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) untuk Perangkat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemkot Bandung. IEPK merupakan salah satu alat ukur dalam rangka merealisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi agar terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Selain itu, IEPK juga merupakan tambahan indikator pengendalian korupsi.

205-3 Insiden Korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

Tidak terdapat informasi yang tersedia dari sumber informasi terkait dengan kasus korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil terkaitnya

KESIMPULAN

Standar GRI 2021 yang telah dicantumkan dalam laporan keberlanjutan pemerintah kota bandung terdiri dari: GRI 2, GRI 3 mengenai pengungkapan umum dan topik material, serta pengungkapan spesifik mengenai dampak ekonomi terdiri dari GRI 201, 202, 203, 204, 205. Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif yang diungkapkan di laporan keberlanjutan menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi. Meskipun begitu, kesimpulan ini ditarik berdasarkan minimnya data dan terdapat batasan dalam penelitian yaitu keterbatasan dalam wawancara pemangku kepentingan yang terkait dengan dampak ekonomi Pemkot Bandung. Hal ini bisa menjadi catatan bagi penelitian selanjutnya untuk mencari lebih banyak data dan informasi yang relevan dan melaksanakan wawancara untuk menghasilkan kesimpulan laporan keberlanjutan yang lebih lengkap dan komprehensif.

Secara keseluruhan, inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki komitmen yang baik dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi. Meskipun begitu, kesimpulan ini ditarik berdasarkan minimnya data dan terdapat batasan dalam penelitian yaitu keterbatasan dalam wawancara pemangku kepentingan yang terkait dengan dampak ekonomi Pemkot Bandung. Hal ini bisa menjadi catatan bagi penelitian selanjutnya untuk mencari lebih banyak data dan informasi yang relevan dan melaksanakan wawancara untuk menghasilkan kesimpulan laporan keberlanjutan yang lebih lengkap dan komprehensif.

Penelitian ini berfokus pada aspek ekonomi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dengan merujuk pada standar GRI tahun 2021. Saat ini, Pemerintah Kota Bandung belum bisa menyusun laporan keberlanjutan yang menggunakan opsi komprehensif berdasarkan GRI Standards 2021 dikarenakan syarat syarat atau indikator laporan keberlanjutan

yang menggunakan opsi komprehensif tidak bisa dipenuhi oleh data atau informasi yang tersedia. Selain itu, data yang digunakan harus lengkap dan rinci, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif.

Tujuan akhir penelitian ini adalah menyusun laporan keberlanjutan. Struktur laporan keberlanjutan untuk Pemerintah Kota Bandung telah disusun dan dikompilasi untuk dibagikan kepada tiga rekan lainnya, terutama dalam penyusunan standar umum. Selain menyusun pengungkapan untuk aspek ekonomi, saya juga menyusun bagian yang berkaitan dengan peran Dinas Daerah Pemerintah Kota Bandung dalam keberlanjutan, baik untuk masing-masing dinas maupun Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan. Draft laporan keberlanjutan ini disusun berdasarkan GRI Standards 2021 yang relevan dengan kondisi Pemerintah Kota Bandung, dengan beberapa modifikasi berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, (2016). Pengeluaran Pemerintah dan Impaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Dampak_pengeluaran_pemerintah_terhadap_pertumbuhan_ekonomi.pdf
- Alcaraz-Quiles, F. J., Navarro-Galera, A., & Ortiz-Rodríguez, D. (2014). Factors determining online sustainability reporting by local governments. *International Review of Administrative Sciences*, 81(1), 79–109. doi:10.1177/0020852314541564
- Alisjahbana, Murningtyas, 2018. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi. Bandung: Unpad Press
- Ardien, Agung (2018) Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Dan Iklim Organisasi Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Other thesis, Universitas Islam Riau.
- Carol A. Adams & Abdullah M. Alhamood & Xinwu He, (2022). The development and implementation of GRI Standards: practice and policy issues, Chapters, dalam Carol A. Adams (ed.), *Handbook of Accounting and Sustainability*, chapter 3, Halaman 26-43, Edward Elgar Publishing.
- Creswell, John W. (2007) *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication Inc.
- Djarwanto, PS. 1994, Pokok – Pokok Analisa Laporan Keuangan. BPFE, Cetakan I, Yogyakarta.
- Donaldson, T., & Preston, L.E. (1995). The Stakeholder Theory of The Corporation: Concepts, Evidence, and Implications. *Academy of Management Review*, 20(1), 65-91.
- Dowling, J. & Pfeffer, J. 1975. Organizational Legitimacy: Social Values And Organizational Behavior. *Pacific Sociological Journal Review*, Vol. 18, Page. 122-136
- Fauzi, Akhmad & Oktavianus, Alex. (2014). Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Mimbar*, Vol 30, No. 42-52
- Freeman, R.E. dan J. McVea. 2001. “A Stakeholder Approach to Strategic Management.”
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI Standards 2016 – Economic Aspect
- Global Reporting Initiative. (2021). GRI Standards 2021
- Greiling, D., Traxler, A. A., & Stötzer, S. (2015). Sustainability reporting in the Austrian, German and Swiss public sector. *International Journal of Public Sector Management*, 28(4/5), 404–428. doi:10.1108/ijpsm-04-2015-0064

- Hafni, A. F., & Priantinah, D. (2018). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertambangan. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(7).
- Hanida, R. P., Irawan, B., & Rozi, F. (2021). Strategi Eliminasi Praktik Korupsi pada Pelayanan Perizinan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 297–312. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.690>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- Kurniawan, P. S., Devi, S., & Astawa, I. G. P. B. (2020, January). Sustainability Reporting Practice in Indonesian Public University: How to Support the Reporting Process?. In 3rd International Conference on Innovative Research Across Disciplines (ICIRAD 2019) (pp. 151-158). Atlantis Press.
- Lane, J. E. 2006. Public administration & public management: The principal-agent perspective. Routledge
- Ma'rif, S., Sugiri, A., Waskitaningsih, N., & Hayati, R. N. (2013). Kajian Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Semarang. *Riptek Vol. 7, No. 2, Tahun 2013*, 11-35. <https://repository.unpak.ac.id/tukangna/repo/file/files-20200908131445.pdf>
- Mardikanto. 2014. CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab SosialKorporasi). Bandung: Alfabeta
- Matondang, Z. (2009). Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed. Vol. 6 No. 1*
- Mulpiani, W. (2019). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 77 - 90. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.16>
- Nada Rosyidah Sari, & Endah Tri Wahyuningtyas, E. T. W. (2020). Studi Penerapan Green Accounting dan Pengungkapan Sustainability Reporting Terhadap Profitabilitas. *PROSIDING NATIONAL CONFERENCE FOR UMMAH*, 1(1). Diakses melalui: <https://conferences.unusa.ac.id/index.php/NCU2020/article/view/613>
- Nurhajanti, Nashirotn N. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Fraud Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Publik. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol. 18 No. 2, Hlm: 209-221 Juli 2017. DOI: 10.18196/jai.180284
- Nurlina, N., & Zurjani, Z. (2018). Dampak Kebijakan Fiskal dan Monter dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 2(2), 126-136. <https://doi.org/10.1234/jse.v2i2.115>
- Ott, J. Steven, Alkbert C. Hyde, and Jay M. Shafritz, eds. 1991. *Public Management: The Essential Readings*. Chicago, IL: Nelson Hall.
- Osborne, David, and Ted Gaebler. 1992. *Reinventing Government : How The Entrepreneur Spirit is Transforming The Public Service*, terjemahan : Mewirauahakan Birokrasi Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik. Alih Bahasa Abdul Rosyid dan Ramelan. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Pemerintah Kota Bandung (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2018-2023.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2020

- Prasetyo, S. D, & Nani, D. A, (2021). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Pada Perusahaan Perkebunan Sub Sektor Sawit Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Accounting Global Journal* Vol. 5 No. 2. 123-1
- Pratama, I. S. & Deviyanti, D. R. (2022). Pengaruh Pengungkapan corporate social responsibility terhadap institutional ownership pada perusahaan high-profile yang listing di bursa efek Indonesia. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* Vol. 18 No. 3. 540-550
- Rokhlinasari, Sri. (2015). Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility Perbankan. *Al-Amwal* Volume 7, No. 1. <http://dx.doi.org/10.24235/amwal.v7i1.217.g195>
- Sidiq, U. & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Ponorogo; CV. Nata Karya
- Slamet, R. & Wahyuningsih, S. (2022). Validitas dan Reliabilitas Terhadap Instrumen Kepuasan Kerja. *Aliansi; Jurnal Manajemen & Bisnis* Vol. 17, No. 2. <https://doi.org/10.46975/aliansi.v17i2.428>
- Stringer, E. T. (2007). Action research Third Edition. London; Sage Publication, Inc.
- Sulistiawati, Eka, & Novita Dirgantari. Analisis Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, vol. 6, no. 1, 2016, doi:10.22219/jrakvol6.no1.%p.
- Taufiqurokhman & Satispi, Epi. (2018). Teori dan Perkembangan Manajemen Publik. Tangerang Selatan; UMJ PRESS 2018
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wijaya, A. F. & Danar, O. R. (2014) Manajemen Publik: Teori dan Praktik. Malang; Universitas Brawijaya Press.
- Williams, B., Wilmshurst, T., & Clift, Robert. (2011) Sustainability reporting by local government in Australia: Current and future prospects. *Accounting Forum* Vol. 35 Issue
- Yin, R. K. (2015). Studi Kasus: Desain & Metode (Ed. 1, Cet. 14 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M., Buys, L., Ioppolo, G., Marques J. S., Costa, E. M., Yun, J. J. (2018). Understanding 'smart cities': Intertwining development drivers with desired outcomes in a multidimensional framework. *Elsevier; Cities* Vol. 81, November 2018, 145-160.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2022
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung 2022
- Laporan Kerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022
- Laporan Keterangan Pertangjawaban Kota Bandung Tahun 2022
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah